

**TESIS**

**“OPTIMLISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA  
KANTOR UPT PENDAPATAN MAROS”**

***(Optimization Of Motor Vehicle Tax Receipts At Maros Revenue Upt  
Office)***

**AHMAD ROSANDI SAKIR**

**E012181015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**SEKOLAH PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**TESIS**

**“OPTIMLISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA  
KANTOR UPT PENDAPATAN MAROS”**

***(Optimization Of Motor Vehicle Tax Receipts At Maros Revenue Upt  
Office)***

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar magister Program Studi  
Administrasi Publik

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:**

**AHMAD ROSANDI SAKIR**

**E012181015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

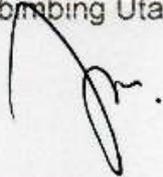
**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh  
**AHMAD ROSANDI SAKIR**  
E012181015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Studi Pemerintahan Daerah Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **5 Februari 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



**Prof. Hj Rabinah Yunus, M.Si.**  
Nip. 19601123 198603 2 001

Pembimbing Pendamping,



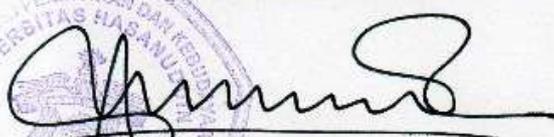
**Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.**  
Nip. 1968411 200012 1 001

Ketua Program Studi  
Pemerintahan Daerah,

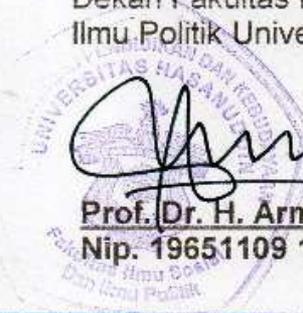


**Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.**  
Nip. 19630921 198202 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
Nip. 19651109 199103 1 008



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rosandi Sakir

Nomor Mahasiswa : E012181015

Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Publik / Pemerintahan Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Ahmad Rosandi Sakir

## **PRAKATA**

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pendapatan Maros ”. Tak lupa pula shalawat dan salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tugas akhir karya ilmiah ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Magister Pemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda H.M.Sakir dan Ibunda Hj Rosmini yang telah berkorban sedemikian banyak untuk penulis, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai seperti saat ini, juga karena segala dukungan yang luar biasa kepada penulis, dorongan, doa, serta kasih sayang yang tak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh Pendidikan hingga akhir studi pada Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin. Kepada Istri Tercinta Sulasmini azis yang

telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti serta cinta dan kasih sayang yang kepada penulis . Terima kasih pula kepada Saudaraku, Suci Sasmita dan Amelia, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis semoga kita bisa menggapai cita-cita agar mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Aamiin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Prof, Dr. Hj. Nurlinah, M.si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atas kesempatan yang diberikan kepada penulis Untuk Menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Prof. Hj. Rabinah, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Suhardiman, M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberi bimbingan, arahan, saran, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Semoga dengan apa yang

diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan kepastakaan Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin.

5. Ibu Prof. Hj. Nurlinah, M.Si, Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si , dan Bapak Dr. Andi Lukman Irwan , M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, kritikan serta perbaikan atas penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik;
6. Seluruh dosen pascasarjana, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Bapak Prof. Dr. A. Gau Kadir, M.Si (Alm), Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si (Alm), Bapak Dr. H. A.M.Rusli, M.Si, Bapak Dr. H.Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si yang telah memberikan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin;
7. Para pegawai dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuannya kepada penulis;
8. Para informan dalam penulisan tesis ini , Bapak Sukur,SE Selaku Kepala UPT Pendapatan Maros , Ibu Sut Mulianah selaku kasi penetapan dan penerimaan , Ibu Rahmatia selaku kasubag tata usaha dan segenap staf dan pegawai UPT Pendapatan Maros yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuannya kepada penulis untuk mendapatkan data, informasi, dan melakukan wawancara;
9. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Magister Pemerintahan Daerah FISIP Unhas; Muh. Zulkarnaen S.IP, Muh. Rezky Gau, S.IP, Hardiyanti

S.IP, Muh. Aksan M, S.IP, Sukma Mahardhiny, S.S, Andi Nur Pratiwi Fatmala, S.IP, Salman, S.Sos, Abd. Wahid S.Sos, Ita Purmalasari, S.STP, Yusriah Amaliah, S.IP, A. Kalam Anshari, S.Sos dan Fahmi Sulthoni. S.IP, terima kasih atas segala pengalaman, kesenangan dan keseruan berbagi ilmu, kekompakan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kebahagiaan dan kesuksesan selalu oleh Allah SWT.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang, doa, dukungan, pelajaran, dan kenangan, tanpa kalian penulis tidak dapat sampai pada titik pencapaian ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya.

Makassar, Februari 2021

Ahmad Rosandi Sakir

## DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Prakata .....	iv
Abstrak.....	viii
Abstrac.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB I ( PENDAHULUAN )</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisa .....	6
1.4 Mamfaat Penulisan .....	6
<b>BAB II ( TIJAUAN PUSTAKA )</b>	
2.1 Konsep Optimalisasi .....	8
2.2 Konsep Peran .....	10
2.3 Konsep Pajak.....	13
2.4 Konsep Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu .....	24
2.6 Kerangka Pikir.....	26
<b>BAB III ( METODE PENELITIAN )</b>	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Informan Penelitian .....	28
3.6 Fokus Penelitian .....	29
3.7 Analisis Data .....	30
<b>BAB IV ( PEMBAHASAN )</b>	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros .....	31
4.2 Badan Pendapatan Daerah.....	38
4.3 UPT Pendapatan Maros .....	41
4.4 Faktor Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor .....	45
4.4.1 Kepatuhan Masyarakat .....	48
4.4.2 kedisiplina Aparat .....	53
4.4.3 Target Yang Terlalu Tinggi.....	58
4.5 upaya Yang Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Knedaraan Bermotor.....	60
4.5.1 Mengoptimalkan Samsat Unggulan.....	61
4.5.2 Melaksanakan Pelayanan Hari Libur.....	65
4.5.3 Melaksanakan Kegiatan Door To Door .....	67
4.5.4 Pelaksanaan Penertiban Pajak Kendaraan .....	71
4.5.5 Melaksanakan Oprasi Tempel Tempel.....	73
4.5.6 Mengoptimalkan Penerimaan PKB alat berat.....	74
4.5.7 Mengoptimalkan Penerimaan PKB Kendaraan Dinas .....	75
4.5.8 Pelaksanaan Penagihan Terhadap Pegawai .....	77
4.5.9 Pembebasan Denda.....	78
4.5.10 Mensosialisasikan E-Samsat.....	80

4.6 Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....	86
4.7 Standar Operasional Prosedure .....	89
BAB V ( PENUTUP )	
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	95
Daftar Pustaka .....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Potensi Kendaraan Bermotor .....	5
Tabel 2 Penelitian terdahulu .....	24
Tabel 3 jumlah Penduduk Kabupaten maros .....	33
Tabel 4 Daftar Pegawai .....	41
Tabel 5 Data Potensi Alat Berat.....	43
Tabel 6 Data Potensi Kendaraan Dinas.....	44
Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor .....	46
Tabel 8 Data KTMDU.....	49
Tabel 9 Rincian Target Penerimaan .....	59
Tabel 10 Jadwal Pelayanan Gerai/Kedai Samsat .....	64
Tabel 11 Jumlah Penerimaan Setaip Gerai/Kedai Samsat .....	64
Tabel 12 jumlah penerimaan PKB Hari Libur .....	67
Tabel 13 Data Hasil Penagihan Door To Door.....	69
Tabel 14 Rekap Penertiban PKB .....	72
Tabel 15 Penerimaan PKB Alat Berat.....	74
Tabel 16 Penerimaan PKB Kendaraan Dinas.....	77
Tabel 17 Hasil Penagihan PKB Pegawai .....	78
Tabel 18 Penerimaan PKB Melalui E-Samsat .....	85
Tabel 19 Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....	88

## ABSTRAK

**AHMAD ROSANDI SAKIR.** *Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Maros (dibimbing oleh Rabinah dan Suhardiman)*

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bermotor pada UPT Pendapatan Maros .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan tentang optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT Pendapatan Maros..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. beberapa penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak kendaraan berrnotor pada UPT Pendapatan Maros adalah kepatuhan masyarakat yang dinilai sangat kurang ditunjukkan dengan masih banyak kendaraan yang tidak didaftar ulang.. Selain itu, faktor kinerja pegawai yang dinilai masih kurang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga sangat susah bagi UPT Pendapatan Maros untuk mencapai di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Adapun upaya yang dilakukan antara lain memaksimalkan samsat unggulan pelaksanaan kegiatan *dor to dor* dan penertiban pajak kendaraan bermotor, mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan alat berat dan kendaraan dinas , serta menyosialisasikan pembayaran melalui E-Samsat.

Kata kunci: Optimalisasi, Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor



## ABSTRACT

**AHMAD ROSANDI SAKIR.** *Optimization of Motor Vehicle Tax Receipts at Maros Income Office (Supervised By Rabina and Suhardiman)*

This study aims to find out the factors that causes the lack of optimal motor vehicle tax receipts and the efforts that have been made to optimize motor vehicle tax receipts in the Maros Revenue Upt.

The type of research used in this research was qualitative descriptive research that provided an explanation of optimization of motor vehicle tax receipts at the Maros Revenue Upt Office.

The results of this study show that some of the causes of the lack of optimal motor vehicle tax receipts in the Maros Revenue Upt is community compliance that is considered very poorly demonstrated by the still many vehicles that are not on the re-list. In addition, the performance factor of employees who are considered still lacking discipline and responsible for the task given and the targets set is too high so it is very difficult for Upt Revenue Maros to reach in the midst of pandemic conditions such as today. While the efforts made include maximizing the samsat flagship, implementation of door to door activities and controlling motor vehicle tax, optimizing tax receipts of heavy equipment vehicles and official vehicles, as well as disseminating payments through E-Samsat.

Keywords: Optimization, Receipt, Motor Vehicle Tax



# **OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Proses pembangunan negara merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-perubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang

diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Ditambah lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurang terhadap pusat, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek pajak yang ada.

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016:4), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal

balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pemerintah Daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat. yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan Pendapatan Daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya, Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BAPENDA) sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah yang melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan pajak-pajak

provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Dan agar memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor maka di dirikanlah Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pendapatan di setiap daerah seperti yang ada di kabupaten Maros Sulawesi Selatan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi saat ini berkembang pesat bukan hanya transportasi umum, namun juga transportasi pribadi. Masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh beberapa pihak yang memberikan kredit, dimana dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak provinsi lainnya.

**Tabel 1**  
**Data Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT**  
**Pendapatan Maros Sampai Dengan Bulan September 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>UNIT</b>	<b>NILAI</b>
1	RODA 4	22.662	41.205.053.705
2	RODA 2	144.291	24.946.791.825

**Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros, Tahun 2020**

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah potensi kendaraan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Maros sangatlah tinggi artinya kendaraan yang terdata dan terdaftar di UPT Maros cukup tinggi . Dengan jumlah yang tinggi maka sudah seharusnya penerimaan pajak kendaraan bermotor juga tinggi, akan tetapi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Maros belum memberikan hasil yang maksimal. Dari data yang ada Sampai bulan September 2020 masih ada pada angka 65% dari yang seharusnya sudah mencapai 75% di triwulan 3. Ini akan menyulitkan unuk mencapai 100% pada akhir tahun Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses penerimaan pajak kendaraan Bermotor dan upaya apa saja yang di lakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Maros dimana pada akhirnya mempengaruhi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, Tentang pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti berusaha untuk mengemukakan permasalahan permasalahan agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah pada pokok masalah yang sebenarnya, maka rumusan masalah yang telah dijabarkan sehingga muncul pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor Faktor apa yang menyebabkan Kurang Optimalnya Penerimaan Pajak kendaraan bermotor pada Upt Pendapatan Wilayah Maros ?
2. Upaya Upaya apa yang telah dilakukan Upt Pendapatan Wilayah Maros untuk mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

- 1) Faktor Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Wilayah Maros
- 2) Upaya Upaya yang di lakukan untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kajian manajemen pelayanan publik.

## 1 Manfaat Praktis

### a) Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada Upt Pendapatan Wilayah Maros.

### b) Masyarakat.

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua kalangan masyarakat agar patuh terhadap kewajiban membayar pajak .

### c) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan sebagai penerapan ilmu pemerintahan daerah pada lingkup masyarakat secara langsung. Selain itu peneliti juga bisa memperoleh ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman baru dari fenomena yang ditemui dalam proses penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep optimalisasi**

#### **2.1.1 Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>1</sup> Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

#### **2.1.2 Tujuan Optimalisasi**

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

### **2.1.3 Alternatif Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

### **2.1.4 Sumber data yang di batasi**

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

### **2.1.5 Mamfaat Optimalisasi**

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga

rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

## **2.2 Konsep Peran**

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu. Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif. Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain.

Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani

masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance). Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

## **2.3 konsep Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.2 Fungsi Pajak**

#### a) Fungsi Budgetair/financial

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

#### b) Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### **2.3.3 Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:

#### 1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri

## 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

## 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **2.3.4 Tata cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

#### 1. Stelsel nyata (riël stelsel)

Peneganaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### 2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali

### **2.3.5 sistem pemungutan pajak**

Dalam pemungutan pajak tentu terdapat langkah-langkah atau sistem dalam pemungutan pajak, Antara lain:

1. Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
  - b. Wajib pajak bersifat pasif
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self Assesment system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
  - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. With holding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya meliputi: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

#### **2.3.6 Tarif Pajak**

Ada empat macam tarif pajak di antaranya adalah:

- a. Tarif Tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (tak base), objek pajak maupun subjek pajak /wajib pajak
- b. Tarif Proporsional/ Sebanding atau sepadan. Tarif ini merupakan sebuah " persentase tunggal" yang dikenakan objek pajak berapapun nilainya. Jadi apabila tarif ini ditetapkan ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenakan pajak (take base).
- c. Tarif Progresif (Persentase Meningkat). Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenakan pajak.

- d. Tarif Degresif (Persentase Menurun). Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang di kenai pajak.

### **2.3.7 Jenis Pajak Daerah**

Penyelenggaraan pemerintah daerah di lakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya, di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kebijakan pajaktahun daerah dan retribusi daerah di laksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun pajak pajak di pungut oleh:

a. Pajak-Pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
4. Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak-Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir.

#### **2.3.8 Bagi Hasil Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah hasil penerimaan pajak propinsi sebagian di peruntuhkan bagi daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di serahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 30%.
- b. Hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor di serahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%.
- c. Hasil dari penerimaan pajak rokok di serahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%.
- d. Hasil penerimaan dari Pajak Air Permukaan di serahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50%. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaannya di serahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.

## **2.4 Konsep Pajak kendaraan Bermotor**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Salah satu penyumbang dengan kontribusi terbesar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui unit pelayanan teknisnya yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dimana dalam menghimpun atau mengumpulkan penerimaan pajak tersebut dilakukan oleh BAPENDA yang dalam hal ini melalui SAMSAT.

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik berupa motor atau peralatan lautnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat

### **2.4.2 Subjek dan wajib pajak kendaraan Bermotor**

Menurut Kesit (2003:100), subyek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka yang disebut Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pengertian memiliki berarti orang yang bersangkutan mempunyai hak sepenuhnya kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan dari kendaraan bermotor tersebut, sedangkan menguasai kendaraan mempunyai arti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki.

Subjek pajak akan menjadi Wajib pajak jika yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, sebagai wajib pajak daerah. Berdasar pengertian ini, maka Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang.

#### **2.4.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Kesit (2003:101), objek pajak adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Karena Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak obyektif atau kebendaan, maka yang menjadi objek pajak adalah keadaan benda tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

#### **2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Kesit (2003:101), Dasar Pengenaan Pajak Merupakan ukuran atau pengakuan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak tersebut harus dapat diukur. Ukuran nilai yang obyektif

adalah nilai penyerahan barang. Berkaitan dengan PKB, maka dengan demikian nilai penyerahan dapat berupa nilai jual-beli, nilai tukar menukar dan lain sebagainya. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- b. Isi silinder dan/atau satuan daya
- c. Penggunaan kendaraan bermotor
- d. Jenis kendaraan bermotor
- e. Merek kendaraan bermotor
- f. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
- g. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
- h. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot ini berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu ditinjau kembali setiap tahun.

#### **2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Kiset (2003:102), Besarnya pokok pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Adapun Tarif Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat- alat besar.

#### **2.4.6 Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Mujiono (2009:9) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun secara tidak langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak tersebut. berbagai kewajiban berkaitan dengan pajak tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba rugi maupun dengan rekening neraca.

Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak proses akuntansinya meliputi :

1. Pengakuan pajak
2. Penggolongan dan Peringkasan pajak
3. Perhitungan pajak
4. Pelaporan pajak

#### **2.4.7 Menejemen Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Mahmudi (2010) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama yang memiliki kota besar dan pada penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, Bandung dan sebagainya. PKB dan BBNKB ini memang memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui sistem komputerisasi., tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis.

Menurut Mahmudi (2010) untuk meningkatkan penerimaan PKB, beberapa pemerintah provinsi melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan harapan setelah kendaraan tersebut dibalik nama maka pemerintah provinsi nantinya akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor bersangkutan. Pertimbangannya adalah keberadaan kendaraan bermotor yang berada

di wilayah provinsi tertentu namun belum dibaliknamakan maka pada dasarnya daerah dirugikan yaitu dari segi penurunan kualitas lingkungan karena polusi udara dan suara bising, serta peningkatan bahan jalan dan kepadatan lalu lintas, sementara itu daerah tidak menerima kompensasi atas berbagai beban daerah tersebut.

Kebijakan lain yang juga dapat ditempuh pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan dengan diameter silinder mesin (CC) lebih besar, kendaraan dengan bobot lebih berat dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Perbaikan pelayanan administrasi juga penting dilakukan misalnya dengan komputersasi sistem administrasi pajak, sistem pelayanan terpadu, penyederhanaan prosedur pembayaran dan menciptakan lingkungan kantor tempat pembayaran pajak yang nyaman bagi masyarakat

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	Frans Eric Junior Siagian	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Penerimaan PKB Di Sumatera Selatan Belum memberikan hasil yang maksimal terhadap PAD di sebabkan target yang terus meningkat dan jumlah tunggakan kendaraan sangat banyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitain ini mengkaji tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor</li> <li>• Masalah Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada penelitian ini yaitu Target yang terus</li> </ul>

				meningkat dan banyak nya tunggakan kendaraan
2	<i>Dewa Elfrieza Yedikade</i>	Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar	potensi dan realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013–2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pencapaian realisasi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 4.210.398.876 atau 64 persen dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu Rp. 3.939.981.196 atau sebesar 51 persen dari potensi yang telah ditetapkan. Rendahnya tingkat penerimaan realisasi PKB di Kabupaten Polewali Mandar diduga karena rendahnya partisipasi dari pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini mengkaji tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor</li> <li>• Penelitian ini mengkaji target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak bisa tercapai</li> <li>• Penyebab dari kurangnya penerimaan adalah kepatuhan masyarakat</li> </ul>

## 2.6 Kerangka Pikir

### OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

